

# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat daerah diwajibkan untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi menerjemahkan perencanaan strategis (renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023, hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan tahun lalu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kesehatan tahun lalu bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

#### 1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- m. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- n. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.
- o. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

#### b. Tujuan

- 1) Memberikan landasan penyusunan KUA dan PPAS tahun 2022 dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2022;
- 2) Sebagai dasar bagi seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 3) Sebagai bahan dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022;
- 4) Memastikan bahwa APBD tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2022;

#### 1.4 Sistematika

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I.           Pendahuluan
- Bab II.          Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2020
- Bab III.        Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV.         Rencana Kerja dan Pendanaan
- Bab V. Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018 - 2023. Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2018 - 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan.

#### A. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Tahun 2019 melaksanakan 15 Program dan 92 Kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan kinerja sasaran dengan capaian 98,72%. Adapun realisasi indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2019 kami sajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Prioritas Nasional  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2020

No.	Indikator Sasaran dan Program Strategis Nasional	Satuan	Tahun		Keterangan
			2019	2020	
1	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.45	73.72	Meningkat
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 LH	37.62	41.8	Menurun

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terkait pembangunan di bidang kesehatan tertuang di Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui tujuan tersebut dirumuskan sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Berikut analisis capaian kinerja atas indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara terperinci:

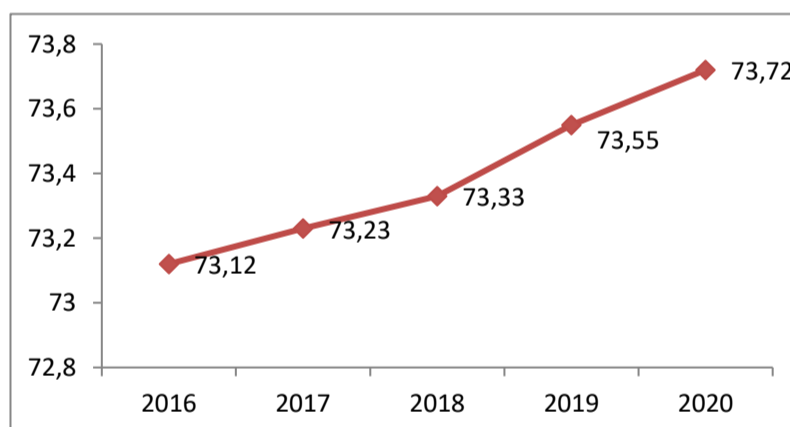
#### 1 Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Angka Usia Harapan Hidup menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Usia Harapan Hidup adalah salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi Angka Usia Harapan Hidup maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang menggambarkan kualitas hidup. Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Usia Harapan Hidup maka Pemerintah Daerah dapat merumuskan upaya dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup yang kemudian berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 mencapai 73,72 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,1 %. Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut diketahui bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam yaitu 73,63 tahun. Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.1  
Trend Angka Usia Harapan Hidup  
di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan grafik 2.3 diketahui bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat. Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas adalah penggalakan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Hingga Tahun 2020 sudah terbentuk 457 Posbindu (Sumber: *Data Progam Pengendalian Penyakit Tahun 2020*) di desa, sekolah maupun perkantoran. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Posbindu diantaranya adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol dan asam urat yang bertujuan untuk skreening Penyakit Tidak Menular.

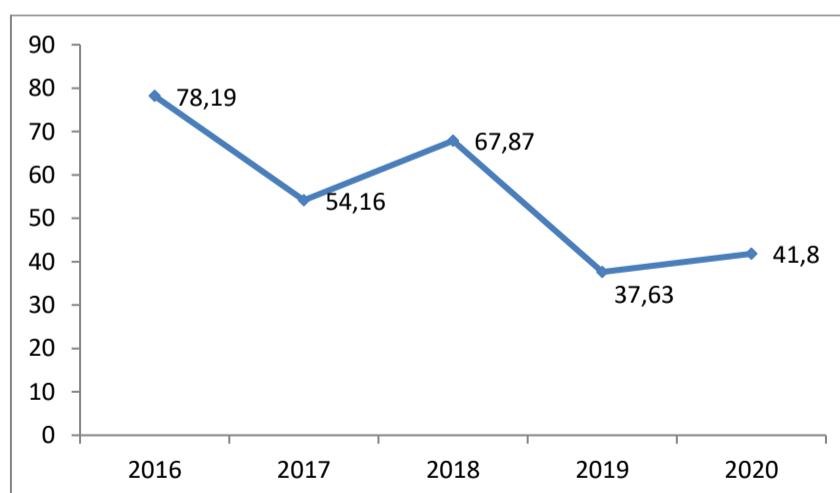
Upaya lain yang telah dilakukan adalah pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Secara khusus, GERMAS meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan angka harapan hidup tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga soal hidup sehat dan produktivitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas juga sangat berkomitmen terkait peningkatan Angka Usia Harapan Hidup, hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menyebutkan bahwa asap rokok mengandung zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, sehingga perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.

## 2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Menurun di tahun 2017 mencapai 54,16 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian di tahun 2018 naik mencapai 67,87 per 100.000 kelahiran hidup. Di tahun 2019 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 44,57% dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020 naik menjadi 41,8 per 100.000 kelahiran hidup. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyumas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam grafik 2.1

Grafik 2.2  
Trend Angka Kematian Ibu (AKI)  
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020



Sumber: Data Program Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2020 terkait Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- Pandemi Covid-19
- Kurang optimalnya pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Sistem P4K belum dijalankan dengan optimal;
- Adanya penyakit penyerta pada ibu;
- Keterlambatan penanganan di RS Rujukan PONEK.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan diantaranya sistem monitoring khusus ibu hamil dan balita sudah dilakukan di Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Yayasan Project HOPE membuat aplikasi PWS KIA dengan nama SATRIA GEMATI pada tahun 2020. SATRIA GEMATI menyajikan seluruh proses pemantauan kesehatan ibu dan anak sampai dengan rujukan terencana.

Proses Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak secara umum dimulai dari pendataan dan pemetaan sasaran program kesehatan ibu dan anak, pencatatan data pelayanan, rujukan terencana, dan pelaporan untuk bahan evaluasi dan pengkajian. Data sasaran yang terdiri atas jumlah seluruh ibu hamil, jumlah seluruh ibu bersalin, jumlah ibu nifas, jumlah seluruh bayi, jumlah seluruh anak balita, dan jumlah seluruh pasangan usia subur diperoleh sejak saat Bidan memulai pekerjaannya di desa/kelurahan. Data sasaran diinput melalui aplikasi SATRIA GEMATI oleh Bidan dalam rangka kegiatan Pendataan dan Pemetaan Ibu Hamil.

Melalui aplikasi SATRIA GEMATI kesehatan ibu hamil dapat dipantau dari periode ANC, persalinan, hingga PNC. Tenaga kesehatan setelah melakukan input data seluruh ibu hamil selanjutnya dapat memantau periode ANC yang diawali dari masa trimester satu, dua, dan tiga.

Bidan di desa/kelurahan serta di fasilitas pelayanan kesehatan mencatat semua detail pelayanan KIA di dalam aplikasi SATRIA GEMATI pada saat ibu hamil melakukan kunjungan dan atau penapisan (*screening*) ANC dan PNC dilakukan. Pencatatan tersebut diperlukan untuk memantau secara intensif dan terus-menerus kondisi dan permasalahan yang ditemukan pada para ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita di desa/kelurahan tersebut. Memasuki periode persalinan data-data bayi yang sudah lahir akan dicatat di aplikasi SATRIA GEMATI (Sistem Aplikasi Terintegrasi Kesehatan Ibu dan Anak Cegah Kematian Ibu dan Bayi). Pada periode PNC atau masa nifas, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada ibu nifas selama 40 hari dari paska persalinan.

Seluruh upaya pemecahan permasalahan tersebut tidak lepas atas dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yaitu dengan adanya Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/3072 Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas serta Keputusan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi.

## **B. Pengukuran Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

## Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2020

No.	Indikator Sasaran dan Program Strategis Nasional	Satuan	Tahun		Keterangan
			2019	2020	
10	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	
12	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	
13	Persentase anak balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
14	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	45.61	60.1	
15	Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75.45	39.86	
16	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	85.75	64	
17	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32.98	35.91	
18	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	91.97	
19	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	99.09	
20	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	
21	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	88,49	

**C. Pengukuran Indikator pelayanan program prioritas Nasional dan Daerah**

Tabel 2.3  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020

No.	Indikator Sasaran dan Program Strategis Nasional	Satuan	Tahun		Keterangan
			2019	2020	
3	Angka Kematian Bayi	per 100.000 LH	7.41	7,06	
4	Angka Kelangsungan Hidup bayi	angka	992	991,99	
5	Angka kematian balita	per 1000 LH	9.18	8.95	
6	Angka Kematian Neonatal	per 1000 LH	4.14	4,5	
7	Prevalensi balita stunting	%	15.96	14.21	
8	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.07	0.06	
9	Prevalensi gizi kurang	%	8.45	7.59	
22	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%	53.8	70.59	
23	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)		0.036	0	



24	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	
25	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	145.52	100	
26	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%	100	100	
27	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	
28	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	11.48	16.62	
29	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	86.91	81.03	
30	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	
31	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100	100	
32	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	
33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	
34	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%	100	100	
35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%	100	100	
36	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	%	100	100	
37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	
38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	%	100	100	
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	
40	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	
42	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%	114.9	100.32	
43	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	1100	100	
44	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	100	73.37	
45	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	98.22	
46	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	
47	Cakupan Puskesmas	%	148	148	
48	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	11.78	11,78	
49	Case Fatality Rate DBD (%)	%	5.9	3,17	
50	Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	81.72	82.58	
51	Non AFP rate per 100.000 penduduk		11.38	1.71	
52	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	
53	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	%	100	100	
54	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	5.94	6,87	
55	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	99,67	
56	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	66.1	61.99	
57	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	79	80	

58	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	87	100	
59	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	%	14,3	59.8	
60	Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	100	100	
61	Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	%	86.91	81.03	
62	Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga	%	29.63	59.26	
63	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%	100	100	
64	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%	100	100	
65	Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	%	100	100	
66	Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5%	%	92.59	88.5	
67	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	75	100	
68	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	100	100	
69	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	%	100	100	
70	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%	100	1	
71	Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	%	114.9	100.32	
72	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%	100	100	
73	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	61.54	100	
74	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%	61.54	100	
75	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%	100	100	
76	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	
77	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	65	
78	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	%	100	85	
79	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	%	87.64	105	
80	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	100	65	
81	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	16.53	13.38	
82	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%	0,035	0,14	
83	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5%	%	4.67	3.9	
84	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	%	8.42	3.53	
85	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	37.21	14.45	

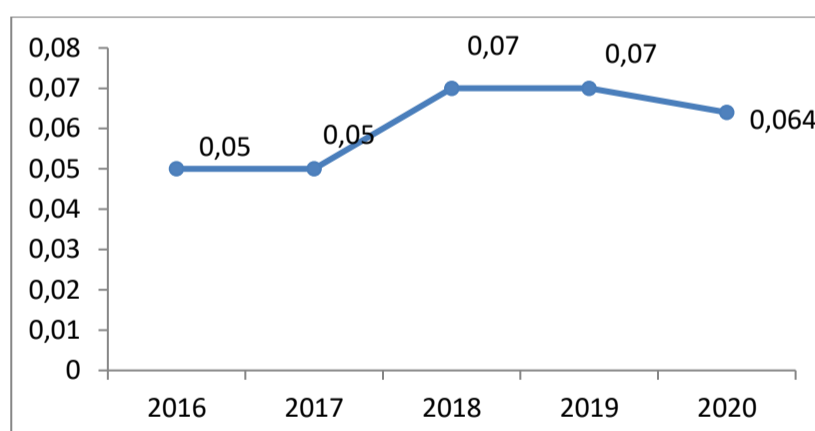
86	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%	100	100
87	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	77.4
88	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/hari	%	83.14	74.7
89	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	83	88,47
90	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.43	0.3
91	Rasio posyandu per satuan balita		20.71	21,18
92	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	per mil	0.046	0.02
93	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per mil	0.0137	0,012
94	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per mil	0.48	0.5
95	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0,001
96	Tingkat Kematian karena Tuberculosis	per 100.000 penduduk	1.46	4,43
97	Tingkat prevalensi Tuberculosis	per 100.000 penduduk	341.8	278

Sumber: Data Terolah Capaian Kinerja Tahun 2020

### 3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 dan tahun 2017 berada pada angka 0,05%. Kemudian di tahun 2018 dan tahun 2019 persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,07% lalu menurun menjadi 0,064 di tahun 2020. Trend persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.3  
Trend Persentase Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020



Sumber: Data Terolah Program Gizi Tahun 2020

Berdasarkan grafik 3.4 diketahui bahwa pada tahun 2019, persentase balita gizi buruk berada pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 0,07%. Selama kurun waktu lima tahun terakhir persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian setiap tahunnya adalah 100 %. Capaian kinerja persentase balita gizi buruk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.5.

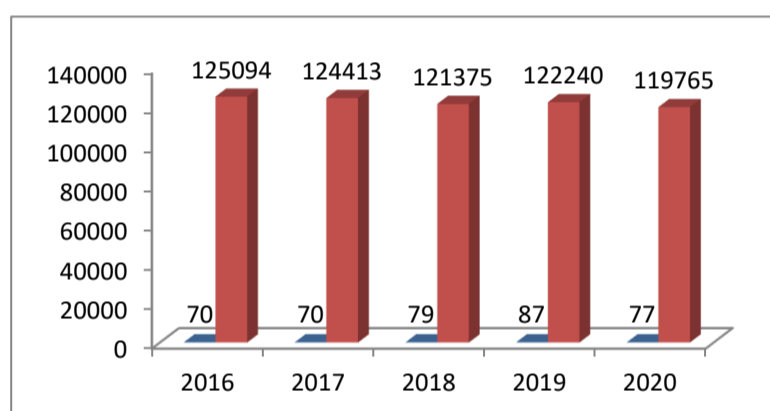
Tabel 2.4  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	0,12	0,05	158,33
2017	0,11	0,05	154,55
2018	0,10	0,07	130
2019	0,07	0,07	100
2020	0,07	0,064	108,15

Sumber: Data Terolah Program Gizi Tahun 2020

Capaian kinerja untuk persentase balita gizi buruk di tahun 2020 adalah 108,15%. Selama lima tahun terakhir walaupun capaian kinerja persentase balita gizi buruk termasuk dalam kategori sangat baik, tetapi capaiannya terus menurun. Hal tersebut dikarenakan terjadi kenaikan persentase balita gizi buruk sebesar 40% dari tahun 2017. Trend jumlah kasus gizi buruk selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 2.4  
Trend Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020



Sumber: Data Terolah Program Gizi Tahun 2019

Jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani pada tahun 2020 sebanyak 77 kasus menurun dari tahun 2019 dengan jumlah 87 kasus, begitu juga dengan jumlah balita di tahun 2020 menurun sebesar 2,02% dari tahun sebelumnya.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan terkait balita gizi buruk diantaranya:

- Pelaksanaan Kelas Ibu dan Bayi (konseling gizi);
- Sosialisasi menu sehat dan seimbang (Puskesmas melalui posyandu, Dinas Kesehatan melalui guru dan bunda PAUD);
- Pemberian PMT 90 hari bagi balita gizi buruk;
- Rujukan ke Rumah Sakit untuk mengetahui sumber masalah penyebab gizi buruk.

## D. Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

### 1. Penganggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian Indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019 secara terperinci dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5  
 Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis  
 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	120.649.130.077	94.520.082.954	78,34
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	15.589.941.400	12.845.235.995	82,39
Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	4.149.240.000	3.222.610.488	77,67
<b>Jumlah</b>		140.388.311.477	110.587.929.437	78,77

*Sumber: Data Terolah Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 2.5 diketahui bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdapat tiga indikator kinerja yang harus dicapai melalui dukungan anggaran yang tersedia sesuai dengan program pendukung pelaksanaan sasaran strategis. Program pendukung untuk masing-masing indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

- a. Angka Usia Harapan Hidup didukung oleh sepuluh program, yaitu :
  - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
  - Program Pelayanan Kesehatan
  - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
  - Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
  - Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan
  - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
  - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat
- b. Angka Kematian Ibu didukung oleh satu program, yaitu:
  - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- c. Prevalensi balita gizi buruk didukung oleh dua program, yaitu:
  - Perbaikan Gizi Masyarakat

Walaupun demikian, dalam rangka mewujudkan kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tidak dapat dilihat secara parsial karena dalam pelaksanaan program saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh

program memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara optimal.

## 1. Analisis Efektifitas

Efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6  
Efektifitas Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	
			Rp	%
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1 indikator	100,12	94.520.082.954	78,34
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	1 indikator	138,07	12.845.235.995	82,39
Meningkatnya kualitas kesehatan balita	1 indikator	108,15	3.222.610.488	77,67
<b>Rata-rata capaian kinerja/ Jumlah</b>		<b>115,59</b>	<b>110.587.929.437</b>	<b>78,77</b>

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.6 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2020 diwujudkan melalui tiga indikator kinerja. Masing-masing sasaran strategis memiliki satu indikator. Efektivitas tertinggi ada pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan ibu dengan capaian kinerja 138,07% dengan realisasi anggaran sebesar 82,39% dari anggaran yang direncanakan. Efektivitas terendah terdapat pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan hidup masyarakat, untuk mencapai capaian kinerja 100,12% anggaran yang terealisasi sebesar 78,34% dari alokasi anggaran program pendukung yang tersedia.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2020 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 115,59% dengan realisasi anggaran sebesar 78,77% dari alokasi anggaran yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas di tahun 2020 masuk dalam kategori sangat efektif. Kategori sangat efektif diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendukung sasaran strategis yang telah dilaksanakan adalah tepat sasaran dan berhasil guna.

## 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis melalui keberhasilan pencapaian indikator kinerja secara optimal dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7  
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1 indikator	100,12	78,34	21,78
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	1 indikator	138,07	82,39	55,68
Meningkatnya kualitas kesehatan balita	1 indikator	108,15	77,67	30,48
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>115,59</b>	<b>78,77</b>	<b>36,82</b>

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui bahwa dari indikator sasaran strategis yang ada, seluruh indikator dengan capaian kinerja lebih dari 100%. Efisiensi dari rata-rata capaian kinerja sasaran dengan capaian anggaran sebesar 36,82%. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan ibu sebesar 55,68%. Tingginya tingkat efisiensi tersebut berbanding lurus dengan tingginya capaian kinerja. Untuk mencapai kinerja sebesar 138,07% membutuhkan anggaran sebesar 82,39% dari alokasi anggaran yang tersedia. Tingkat efisiensi urutan kedua adalah pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan balita dengan nilai efisiensi 30,48%. Diartikan bahwa untuk mencapai kinerja 108,15% memerlukan dukungan anggaran sebesar 77,67% dari alokasi anggaran yang tersedia.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **A. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

**“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Banyumas tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,**

##### **B. Sasaran**

Sasaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya adalah Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan indikator :

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)
- 2) Angka Kematian Ibu melahirkan, dan
- 3) Prevalensi Balita Gizi buruk

##### **C. Rencana Program dan kegiatan tahun 2022**

Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 merupakan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

Rancangan Renja Tahun 2022 terdiri dari 4 Program wajib 14 kegiatan, 1 program penunjang, 6 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan, yang terinci dalam tabel 3.1.



**Tabel. 3.1.**  
**Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>187.638.421.163</b>	
07	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>103.428.746.485</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>280.757.270</b>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10 dokumen	100 %	170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7 dokumen	100 %	110.757.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
03	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>99.671.116.726</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan Jumlah insentif tenaga kesehatan penanganan Covid19	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100 %	1413 orang 12 bulan	100 %	99.217.316.726	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100 %	55 orang	100 %	228.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah audit keuangan PPK BLUD	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100 %	40 paket	100 %	225.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
03	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>655.508.989</b>	
04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %	5 Jenis	100 %	11.782.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %	11 Jenis	100 %	114.079.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %	21 Jenis	100 %	32.407.992	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %	12 bulan	100 %	174.834.997	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %	1116 buah 150000 lembar	100 %	67.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi / Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi / Pusat yang dilaksanakan	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %	48 kali	100 %	254.505.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

11	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>233.630.500</b>	
	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 %	5 unit	100 %	49.562.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 %	21 Jenis	100 %	148.958.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 unit	100 %	35.110.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
04	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2.312.196.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	12 bulan	100 %	301.077.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	3 Jenis	100 %	8.832.000	
06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Non ASN	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	79 orang	100 %	2.002.287.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>275.537.000</b>	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	100 %	1 unit	100 persen	114.750.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	100 %	7 unit	100 persen	73.763.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	100 %	1 unit	100 persen	75.270.000	
01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	100 %	1 unit	100 persen	11.754.000	
02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							<b>79.464.507.178</b>	
03	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>35.714.256.953</b>	
04	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah Ded/review DED Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 dokumen	100 %	99.825.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
05	Pembangunan Puskesmas	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas Kembaran I (Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan) Pembangunan Puskesmas Purwokerto Timur I (Pajak Rokok Pel. Kesehatan) Puskesmas Kedungbanteng (DAK Fisik Bidang Kesehatan )	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 unit 1 unit 1 unit	100 %	10.572.720.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar
06	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah DED/review DED pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 dokumen	100 %	49.896.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
07	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah DED/review DED pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 dokumen	100 %	99.921.600	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
08	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %		100 %	299.996.100	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan

		kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan							
09	Pengembangan Puskesmas	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Pembangunan Aula Puskesmas Purwokerto Utara II (Pajak rokok Pel. Kes) pembangunan Prasling Sumpiuh II (pajak rokok Pel. Kes) Pembangunan Puskesmas Somagede (DAK Fisik Kesehatan Dasar)	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 unit 1 unit 1 unit	100 %	2.297.910.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- Gedung Olahraga
10	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %		100 %	12.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah DED/review DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 dokumen	100 %	49.896.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Pembangunan Prasling Puskesmas Gumelar (Pajak Rokok Pel. Kes) Pembangunan Pustu Dermaji Lumbir (Pajak Rokok Pel. Kes) Pembangunan pustu Grujugan Kemranjen II (Pajak Rokok Pel. Kes) Rehabilitasi puskesmas Kemranjen	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	100 %	999.440.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %		100 %	10.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %		100 %	10.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
15	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah Pengadaan sarana Fasilitas pelayanan kesehatan (DAK Fisik Kesehatan pelayanan kes Dasar)	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	4 unit	100 %	4.186.840.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar
16	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Pembangunan IPAL Puskesmas kedungbanteng, Rawalo, Kemranjen II ( Pajak Rokok Pel. Kes dan Dak Fisik Pel. Dasar) Pengadaan Ambulanc dan Mobil Fogging ( Pajak Rokok Pel. Kes) Pengadaan genset RSKMP dan Wangon II (DBHCHT) Pengadaan Pusling Puskesmas Pwt Barat dan Pusk. Lumbir (Pajak rokok pel.kes dan DAK fisik Kes Dasar)	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	3 unit 2 unit 2 unit 2 unit	100 %	1.195.085.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DBH CHT DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar
17	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan (Pajak rokok Pel. Kes, DAK Fisik Kesehatan Dasar dan DBHCHT)	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	9 paket	100 %	5.748.193.550	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DBH CHT DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

18	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	10 unit	100 %	119.639.500	DAK Non Fisik- PK2UKM
	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan vaksin (DAK FISIK)	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 paket	100 %	2.833.965.964	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan
01	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan BMHP( DAK Fisik)	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	6 paket	100 %	7.077.460.239	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan
02	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 unit	100 %	49.588.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
03	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>42.184.016.825</b>	
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase ibu hamil yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	224.921.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumah pelayanan jaminan kesehatan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan KB Persentase ibu bersalin yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	12 Bulan 100 %	86.7 %	6.872.884.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik- BOKKB- Jaminan Persalinan

06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase bayi baru lahir yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	120.228.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase balita yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	133.475.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar ( DAK Non Fisik- BOKKB-BOK)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	165.078.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase Usia produktif (15 - 59 th) yang dikelola pelayanan kesehatannya sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	251.655.000	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	% usia lanjut (diatas 60th) yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar (DAK Non Fisik- BOKKB-BOK)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	156.548.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar( Pajak rokok yan kesehatan, PAD)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	200.718.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase penderita DM yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar (DAK NON FISIK BOK KB BOK)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	136.488.000	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase penderita ODGJ yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	165.090.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase orang terduga tuberculosi yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar ( dak fisik-bokkb-BOK)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	361.618.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang pelayanan kesehatannya dikelola sesuai standar (Pajak rokok Yankes, dak fisik-bokkb-Kabupaten)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	313.556.000	Pajak Rokok DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Terlaksananya Penyeleidikan Epidemiologi (PE) KLB penyakit dalam waktu 1 x 24 jam	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 persen	86.7 %	258.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	% penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	1.249.999.000	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Cakupan balita gizi kurang yang mendapat PMT Cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro Persentase balita dua tahun keluarga miskin yang pelayanan kesehatan gizinya (mendapat MP ASI) dikelola Persentase balita Gizi buruk mendapat perawatan Persentase bayi 6 bulan yang pelayanan kesehatan gizinya (mendapat ASI eksklusif) dikelola	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	85 % 80 % 90 % 1800 orang 100 % 100 % 65 % 23 % 0.06 % 6.5 % 16 % 9 % 8 %	86.7 %	2.032.147.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
18									

			Persentase ibu hamil anemia yang pelayanan Gizinya dikelola Prevalensi Balita gizi buruk Prevalensi Balita gizi kurang Prevalensi Balita stunting Prevalensi Balita wasting Proporsi penduduk dengan asupan <2100 kkal/kapita/hari						
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan kesehatan olah raga	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	80 % 80 %	86.7 %	116.765.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan STBM Jumlah Puskesmas yang mengelola kesehatan lingkungan	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	27 Kecamatan 40 Puskesmas	86.7 %	316.543.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
21	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	% Desa Siaga Aktif Mandiri yang dikelola Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	186.543.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- PK2UKM
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan tradisonal (DAK Non Fisik BOKKB BOK) Jumlah Bimbingan teknis petugas pj Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya kesehatan tradisional di Puskesmas (PAD) jumlah koordinasi dan konsultasi (DAK Non Fisik BOKKB BOK) jumlah Monev pelayanan kesehatan tradisional (DAK Non Fisik BOKKB BOK) Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 % 12 kali 41 kali 126 kali 5 jenis	86.7 %	140.575.875	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

			Lainnya yang dikelola Puskesmas (PAD)						
23	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah jenis surveilans yang dikelola jumlah Pendampingan pembinaan kesehatan haji risiko tinggi jumlah penemuan kasus AFP Prosentase calon jemaah haji yang dilakukan surveilans kesehatan haji Prosentase desa/kel terjadi Kejadian Luar Biasa yang dilakukan Penyelidikan Epideniologi < 24 jam	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	23 Jenis 80 kali 8 kasus 100 % 100 %	86.7 %	600.000.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	1. Pelayanan esehatan ODMK sesuai standard	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah Advokasi dan koordinasi pelayanan kesehatan jiwa dan napza jumlah Fasilitasi dan Bimbingan teknis petugas pj kesehatan jiwa masyarakat jumlah Monitoring dan evaluasi ODMK dan NAPZA % kasus kesehatan jiwa dan NAPZA yang dilayani sesuai standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	3 kali 2 kali 40 kali 100 %	86.7 %	93.208.000	
26	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	indek upaya kesehatan (Indikator Keluarga Sehat) yang dikelola ( DAK Non Fisik BOKKB BOK ) jumlah Bimbingan teknis petugas kesehatan khusus ( PIS PK) Puskesmas ( DAK Non	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	0.22 point 12 kali 262 kali 96 kali	86.7 %	205.620.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

			Fisik BOKKB BOK ) jumlah Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi PIS - PK (PAD) jumlah Visitasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan (PAD)						
27	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah pelatihan pengelolaan penanganan krisis kesehatan dan pasca krisis pada petugas kesehatan (PAJAK ROKOK PELAYANAN KESEHATAN) Jumlah upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan yang dikelola (PAJAK ROKOK PELAYANAN KESEHATAN) Monitoring upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan yang dikelola ( PAJAK ROKOK PELAYANAN KESEHATAN )	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	9 kali 1 jenis 7 laporan kasus	86.7 %	202.008.125	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
28	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah bimbingan/Fasilitasi teknis P2B2 dan P2ML(Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan)) jumlah koordinasi P2B2 dan P2ML (Pajak Rokok- pelayanan Kesehatan) Jumlah pelayanan Fogging Fokus (dak fisik-bokkb- Kabupaten) jumlah pelayanan Skrinning Talasemia (dak fisik-bokkb- Kabupaten)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	6 kali 6 kali 200 paket 10000 orang	86.7 %	1.449.965.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
29	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah peserta KIS PBI kelas 3 yang dikelola (Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	250000 jiwa	86.7 %	23.490.624.500	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan

30	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Cakupan skrining NAPZA di Fasyankes Cakupan skrining NAPZA di sekolah	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 % 100 %	86.7 %	50.179.000	
31	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Terlaksananya pendampingan pengambilan spesimen penyakit potensial KLB Terlaksananya pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium pemeriksa /rujukan /nasional	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	30 kali 200 kali	86.7 %	192.649.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
35	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	% Kecamatan yang melaksanakan Kabupaten Sehat	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 %	86.7 %	100.359.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
36	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah dokumen Rancangan Telemedicine jumlah kaji banding jumlah koordinasi dan konsultasi tentang telemedicine di Fasyankes	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 dokumen 1 paket 5 kali	86.7 %	75.210.625	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
37	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan		Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %		86.7 %	10.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
38	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	jumlah Pendampingan Akreditasi Puskesmas Jumlah Survey Akreditasi Puskesmas jumlah Workshop Akreditasi Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	30 OK 10 Puskesmas 7 Paket	86.7 %	1.925.402.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Biaya perawatan kasus KIPI Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis untuk vaksinasi covid	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	100 % 3 paket 2 paket 12 kali	86.7 %	75.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok

			Jumlah Pengambilan logistik vaksin rutin						
01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah Penyelidikan epidemiologi dan respon cepat penanggulangan KLB/wabah dan dampak bencana	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	30 kejadian	86.7 %	100.359.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
02	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana pendukung Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia dan dikelola (DAK NON FISIK BOKKB BOK)	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan	100 %	1 paket	86.7 %	199.999.825	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>							<b>649.999.900</b>	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	jumlah buku Profil jumlah Fasilitasi teknis petugas aplikasi SIMPUS jumlah Rancangan pengembangan aplikasi SIMPUS si Putri Hebat Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola	Persentase sistem informasi yang terintegrasi / jumlah sistem informasi kesehatan yang ada	50 %	1 buah 1 kali 1 dokumen 50 Jenis	50 %	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	jumlah buku Profil jumlah Fasilitasi teknis petugas aplikasi SIMPUS jumlah Rancangan pengembangan aplikasi SIMPUS si Putri Hebat Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola	Persentase sistem informasi yang terintegrasi / jumlah sistem informasi kesehatan yang ada	50 %	1 buah 1 kali 1 dokumen 50 Jenis	50 %	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	jumlah Pengadaan alat/perangkat SIK	Persentase sistem informasi yang terintegrasi / jumlah sistem informasi kesehatan yang ada	50 %	1 paket	50 %	299.999.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
03	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>916.233.500</b>	

04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase Rumah sakit yang berijin	Presentase RS Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin ( PAD ))	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin / Jumlah RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada	100 %	100 %	100 %	78.634.375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah sakit yang berijin	Jumlah kebijakan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditingkatkan	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin / Jumlah RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada	100 %	44 kebijakan	100 %	99.999.125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Rumah sakit yang berijin	Jumlah Pendampingan Akreditasi Perdana Puskesmas	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin / Jumlah RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada	100 %	40 kegiatan	100 %	437.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah sakit yang berijin	jumlah Operasional pelayanan RS Khusus Mata ( Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan ) jumlah Operasional Pelayanan rujukan gadar (PSC) (Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan)	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin / Jumlah RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada	100 %	12 bulan 12 bulan	100 %	300.000.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>							<b>3.792.160.500</b>	
	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>							<b>60.179.000</b>	
01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	jumlah Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perizinan praktik tenaga kesehatan Prosentase tenaga kesehatan mempunyai ijin praktik	Persentase tenaga kesehatan yang berijin / jumlah tenaga kesehatan yang ada	100 %	3 kali 100 %	100 %	50.179.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin		Persentase tenaga kesehatan yang berijin / jumlah tenaga kesehatan yang ada	100 %		100 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

03	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>							<b>2.981.981.500</b>	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	Jumlah Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebutuhan SDM	Persentase analisis beban kerja untuk perencanaan pemenuhan SDM	50 %	30 kali	100 %	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	Jumlah Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Kebutuhan SDM jumlah insentif tenaga kesehatan Jumlah Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebutuhan SDM	Persentase analisis beban kerja untuk perencanaan pemenuhan SDM	50 %	8 kali 12 bulan 30 kali	100 %	2.806.981.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi	Jumlah Bimbingan Teknis petugas pembinaan dan pengawas SDM Jumlah Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan SDM Jumlah tenaga kesehatan berprestasi/terbaik	Persentase analisis beban kerja untuk perencanaan pemenuhan SDM	50 %	1 kali 3 kegiatan 7 jenis	100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>750.000.000</b>		
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM tenaga kesehatan	Jumlah Bimbingan Teknis petugas tentang perijinan SDM Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan jumlah tenaga kesehatan di dilatih Pajak Rokok Pelayanan Kesehatan jumlah tenaga kesehatan yang diuji kompetensi pajak rokok pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang terregistrasi	100 %	2 jenis 40 orang 30 orang	100 %	750.000.000	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
02	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>							<b>393.007.000</b>	
03	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>							<b>90.737.000</b>	



	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin	Jumlah Bimbingan Teknis bagi petugas pengendalian dan pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, toko alkes dan optikal yg berijin / apotik, toko obat, toko alkes dan optikal yang ada	100 %	150 orang 12 kali	100 %	60.215.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin	Jumlah data apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersedia ( dana Khusus DAK Non Fisik BOKKB BOK)	Persentase apotik, toko obat, toko alkes dan optikal yg berijin / apotik, toko obat, toko alkes dan optikal yang ada	100 %	1 tabel	100 %	20.522.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin		Persentase apotik, toko obat, toko alkes dan optikal yg berijin / apotik, toko obat, toko alkes dan optikal yang ada	100 %		100 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>								<b>20.000.000</b>	
01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin			100 %			10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin			100 %			10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>							<b>128.203.000</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sertifikasi produksi Sarana Produksi Alat Kesehatan	Jumlah peserta penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Sertifikasi Orang	Persentase PIRT yang bersertifikat/Jumlah PIRT yang ada	100 %	500 orang	100 %	128.203.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
01	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>							<b>10.000.000</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin			100 %			10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>							<b>10.000.000</b>	
02	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin			100 %			10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>							<b>134.067.000</b>	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan post market	Jumlah Pemeriksaan kualitas makanan minuman post market Persentase pengawasan post market IRTP	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga/ jumlah Produsen dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %	100 sampel 10 persen	100 %	124.067.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
01	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan post market		Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga/ jumlah Produsen dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %		100 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>							<b>560.000.000</b>	
01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>300.000.000</b>	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kecamatan dengan Pokjandal Desa Siaga	Persentase kecamatan dengan Pokjandal Desa Siaga	Persentase Kecamatan dengan melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	12,5 %	25 %	25 %	300.000.000	
01	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>250.000.000</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PHBS	100 %	100 %	100 %	250.000.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>10.000.000</b>	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	Prosentase Kecamatan dengan UKBM aktif		100 %	50 %		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	<b>Jumlah Total :</b>							<b>187.638.421.163</b>	

## **BAB IV PENUTUP**


Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Yang Berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Dimana RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Renja ini disusun dengan melakukan penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dijadikan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022. Disamping itu Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Program Kegiatan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 tidak terlepas dari komitmen, peran dan tanggungjawab seluruh komponen Dinas Kesehatan serta peran aktif stakeholder yang terkait.

Purwokerto, Juni 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUMAS



**SADIYANTO, SKM, M. Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621011 1984021001